

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

*(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang
Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota)*

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

MEDYNATUL

2012/1202602

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
*(Studi Empiris Pada Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan
Kabupaten Lima Puluh Kota)*

Oleh :

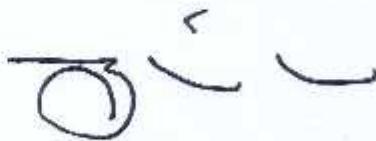
Medynatul
1202602/2012

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode Maret 2017
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 7 Februari 2017

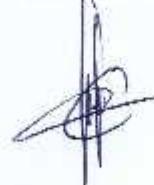
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota)

Medynatul

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email: Medhyn19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah terkait dengan opini yang diperoleh dari BPK pada tiga Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianalisis menggunakan item pengungkapan yang dikeluarkan PP No.24 Tahun 2005. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota . Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan ketiga pemerintah daerah pada tahun 2012-2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong pada pengungkapan yang cukup luas. Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Kata Kunci: Pengungkapan, Opini

ABSTRACT

The Purpose of this research is to analyze the disclosure level of local government areas. Local Government financial statement is analyzed by using disclosure items released in PP No.24 Year 2005. The type of this research is qualitative research. This research was conducted at Tanah Datar Regency, Padang Panjang City, and Lima Puluh Kota Regency. The research was conducted by analyzing the financial statement of these three Local Government areas in 2012-2014.

The Results of the research showed that the disclosure level of Tanah Datar Regency, Padang Panjang City, and Lima Puluh Kota Regency classified as massive disclosures. The financial statement of Tanah Datar Regency, Padang Panjang City, and Lima Puluh Kota Regency have their own strengths and weaknesses.

Keyword: Disclosure, Opinion

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi keuangan tersebut merupakan suatu berkah (*blessing in disguised*) dari gerakan yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi. Tonggak sejarah reformasi keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Menurut Mahmudi (2010:2), tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan di daerah.

Pada saat dimulainya otonomi daerah tersebut harapan yang muncul adalah pemerintah daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun melakukan pembangunan di daerah masing-masing, karena setiap daerah diberi kebebasan dalam hal

penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya, penilaian kerja pemerintah dan sebagai alat pemotivasi.

Menurut Bastian (2010:137) pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah

Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 24 (PP No. 71 tahun 2010) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Prinsip ini mengharuskan agar laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 24 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran. Begitu pula dalam paragraf-paragraf selanjutnya yang menjelaskan pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna, sebab hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian, adanya pemenuhan atas pengungkapan akan berguna dan memudahkan pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan dan menjadi salah satu kriteria penentuan opini dari audit BPK atas Laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini tersebut didasarkan atas kriteria menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Salah satu kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*). Oleh karena itu pengungkapan (*disclosure*) merupakan hal yang

sangat penting dalam pemeriksaan untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya perbaikan laporan keuangan pemerintah untuk mencapai target pemerintah, bahwa pada tahun 2015 opini WTP harus mencapai 60%. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan sadar akan kebutuhan akuntabilitas dan transparansi melalui bentuk penilaian dan evaluasi atas pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jarang penelitian yang membuktikan adanya pengaruh pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintah terhadap opini karena terbatasnya informasi dan data dari pemerintah yang sulit diakses publik, dan cenderung rahasia.

Penelitian ini juga berupaya mengembangkan dan memberi jawaban atas adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu. Penelitian Adhriani (2014) menunjukan tidak terdapat kaitan antara tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan opini yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rayanim (2014) tentang Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa pengungkapan tidak berhubungan dengan penetapan opini yang

diberikan oleh BPK. Penelitian juga dilakukan oleh Arfiah (2014) mengenai Analisis Tingkat *Disclosure* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan opini tidak tergantung kepada tingkat *Disclosure* Laporan Keuangan yang diperoleh oleh Kabupaten Pasaman Barat .

Masih adanya pertentangan atas hasil penelitian, dan adanya ketidak konsistenan hasil atas faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk hubungannya dengan hasil opini audit, membuat penulis tertarik melakukan analisis mengenai apakah ada keterkaitan antara tingkat pengungkapan laporan keuangan terkait dengan Perolehan Opini Audit dari BPK suatu Pemerintah Daerah khususnya di wilayah Sumatera Barat.

Secara umum akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat semakin membaik dari tahun ke tahun ditandai dengan turunnya jumlah pemda yang mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian” dari 13 (tiga belas) pemda pada tahun 2013 menjadi 11 (sebelas) pemda di tahun 2014 diikuti meningkatnya jumlah pemda yang mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” menjadi 9 (sembilan) pemda pada tahun 2014 dari 7 (tujuh) pemda pada tahun 2013.

Dari Gambaran diatas peneliti tertarik meneliti apakah memang terdapat keterkaitan antara kualitas pengungkapan

informasi laporan keuangan dengan opini yang diperoleh. Untuk tujuan tersebut peneliti mengambil 3 sampel Pemerintah Daerah se Sumatera barat yang mewakili pmda dengan status Opini **WTP** dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang diwakili oleh **Pemkab Tanah Datar**, status opini **naik turun** dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 diwakili **Pemkot Padang Panjang**, dan status Opini **WDP** dari tahun 2012 sampai 2014 diwakili **Pemkab Lima Puluh Kota**.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya pengungkapan (*disclosure*) yang lengkap, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan analisa pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul “**Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**”.

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengungkapan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2012 ke tahun 2014 pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan masalah yang diteliti , maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2012-2014.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas , maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi aspek teoritis, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan akuntansi pemerintah di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah untuk menjadi lebih baik.
3. Sebagai wadah untuk menambah pengetahuan sehubungan dengan masalah tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah. Selain itu penulis dapat menentukan pokok permasalahan yang ada dan menentukan alternatif cara penyelesaiannya.

2. KAJIAN TEORI

A. Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan.

Menurut Suwardjono (2008) Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

- a. Pengungkapan Wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.
- b. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

B. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berikut adalah karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Pura (2013:11):

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan/ *Reliabilitas*
4. Dapat diperbandingkan/ *Komparabilitas*
5. Netral
6. Tepat waktu
7. Lengkap

C. Opini Audit

Menurut Bastian (2008:194) ada lima jenis opini audit yang diberikan oleh auditor yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian
4. Pendapat Tidak Wajar
5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat.

D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP merupakan seperangkat

laporan pemerintah yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Komponen –Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen –komponen laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Laporan Realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

F. Prinsip Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah menurut PP Nomor 24 tahun 2005, yaitu:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis (*Historical Cost*)
3. Prinsip realisasi (*Realization*)
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form*)
5. Prinsip periodesitas (*Periodicity*)
6. Prinsip konsistensi (*Consistency*)
7. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure*)

8. Prinsip penyajian wajar
(*Fair Presentation*)

G. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kasmir (2010:66), Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Seperti diketahui bahwa laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkannya pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perubahan terkini.

H. Standar Akuntansi Pemerintah

Perkembangan akuntansi di pemerintahan sejak era otonomi daerah sangat pesat dengan munculnya PP No 24 tahun 2005 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju basis akrual, yang kemudian di perbaharui PP No.71 tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis *full* akrual.

I. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat Laporan Keuangan Pemerintah daerah provinsi harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tingkat

pengungkapan yang harus diungkapkan adalah:

1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi)
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro
3. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan
5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Pengungkapan lainnya
7. Penutup

J. PP Nomor 24 Tahun 2005

Menurut Priyono (2012:81), Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pertama kali dimiliki dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 menggunakan pendekatan *cash towards accrual* (CTA) dalam sistem pencatatan akuntansinya. Mulai tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian Fitri (2010), dengan judul Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (suatu studi eksploratif pada kabupaten/kota di Sumatera Barat), hasil penelitiannya adalah Rata-rata tingkat pengungkapan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 43.71%, dengan tingkat pengungkapan yang tertinggi adalah 54% yaitu Kabupaten Pasaman Barat, dan tingkat pengungkapan yang terendah adalah 33% yaitu Kabupaten Solok Selatan. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan tidak berkaitan dengan opini yang diperoleh.

Marjulin (2012) dengan judul Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Banda Aceh dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa hasil opini tidak berkaitan dengan kualitas pengungkapan

L. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga Daerah ini dijadikan objek penelitian karena masing-masing daerah memiliki kriteria dan kualitas yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data dokumenter. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Variabel dan Pengukuran

Pengukuran variable dalam penelitian ini menggunakan *Compliance Indexs* (Indeks Kepatuhan).

Tingkat pengungkapan ini diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dengan item-item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut:

- Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan (mematuhi) dan skor 0 tidak diungkapkan.

- b. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapat skor total.
- c. Perhitungan indeks tingkat pengungkapan laporan keuangan diukur dengan rasio total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh. Skor maksimal tiap-tiap blok berbeda sesuai penyesuaian yang telah dilakukan pada masing-masing blok.

Analisis Data

Pengolahan data dalam teknik ini adalah menggunakan *quantitative content analysis*. Menurut Emzir(2011:283), *Content analysis* (analisis isi) merupakan suatu analisis mendalam terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur. *Content analysis* ini menggunakan teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Menurut Fitri (2010:41), Prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri 5 tahapan, yaitu:

1. Merumuskan pertanyaan penelitian
2. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis
3. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean
4. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data
5. Interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh

Dalam penelitian ini range yang ditetapkan untuk menentukan apakah Tingkat Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tergolong rendah dan cukup luas merupakan range yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan dengan skala Gutman.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS

Gambaran Umum Kabupaten/ Kota yang Diteliti

Daerah yang menjadi objek penelitian terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang dipilih dengan kategori: satu daerah yang konsisten memperoleh opini WTP tiga tahun berturut yaitu Kabupaten Tanah Datar, satu daerah yang konsisten memperoleh opini WDP tiga tahun berturut yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan satu daerah yang memperoleh opini naik turun yaitu Kota Padang Panjang.

Sumber data dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2012-2014 yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Tanah datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Analisis Pengungkapan Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian terhadap kinerja pemerintah dengan hanya mengandalkan laporan keuangan yang disajikan di Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Ekuitas tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut tentang informasi yang perlu diketahui oleh pengguna laporan keuangan tentu tidaklah mungkin. Sehingga dengan adanya catatan atas laporan keuangan yang diatur oleh PSAP No.4 yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan informasi apa saja yang perlu diungkapkan perlu mengacu pada *best practices* yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Indeks pengungkapan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 item, terdiri dari 5 item pada penyajian laporan keuangan, 43 item pengungkapan dalam neraca, 16 item pengungkapan dalam laporan realisasi anggaran, 1 item dalam laporan arus kas, dan 38 item pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi dalam penerapannya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan posisi keuangan masing-masing daerah.

Tingkat Rincian Akun Yang diungkapkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PSAP No.01 paragraf 43 “Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas dana”

Hal ini merupakan batasan minimum akun yang disajikan dalam neraca, sedangkan contoh format neraca disajikan dalam lampiran, dan bukan merupakan bagian dari standar tapi hanya sebagai ilustrasi, sehingga dalam prakteknya terjadi ketidakseragaman dalam rincian akun yang disajikan.

Sedangkan menurut PSAP No.02 paragraf 14 “Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/ defisit
- 5) Penerimaan pembiayaan
- 6) Pembiayaan neto
- 7) SILPA/ SIKPA”

Menurut PSAP No.03 paragraf 14 “Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset

nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

Berikut adalah hasil dari rincian akun Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pertahunnya yang diteliti

1) Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012 sampai tahun 2014 telah mengungkapkan akun-akun di neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP. Namun Pada laporan realisasi anggaran akun pembiayaan tidak diungkapkan. Sehingga skor maksimal untuk Kabupaten Tanah Datar tinggal 98 item.

2) Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang pada tahun 2012 sampai 2014 telah menyajikan mengungkapkan akun-akun di neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP . . Namun pada bagian neraca investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang tidak diungkapkan. Sehingga pengungkapan informasi akun investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan akun kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tidak dapat diskoring. Selain itu pada laporan realisasi anggaran, akun pembiayaan juga tidak diungkapkan. Berarti pengungkapan informasi akun pembiayaan juga tidak dapat diskoring, Selanjutnya untuk

pengungkapan informasi kejadian penting selama tahun pelaporan juga tidak dapat diskoring. Sehingga skor maksimal untuk Kota Padang Panjang tinggal 88 item.

3) Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2012 sampai tahun 2014 telah mengungkapkan akun-akun di neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas sesuai dengan SAP . Namun pada bagian neraca akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana cadangan serta informasi penyusutan tidak diungkapkan. Selain itu pada laporan realisasi anggaran, bagian akun pembiayaan juga tidak diungkapkan. Sehingga pengungkapan informasi untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas dana cadangan dan informasi penyusutan tidak bisa diskoring. Selanjutnya pengungkapan informasi kejadian penting selama tahun pelaporan juga tidak bisa diskoring. Sehingga skor maksimal untuk Kabupaten Lima Puluh Kota tinggal 94 item.

Tingkat Keluasan Informasi yang Diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengungkapan penyajian laporan keuangan jumlah pengungkapan yang seharusnya 5

item. Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, masing-masing telah mengungkapkannya dari tahun 2012-2014.

Ditinjau dari pengungkapan neraca, jumlah pengungkapan yang seharusnya pada Kabupaten Tanah Datar adalah 43 item, rata-rata pengungkapan Kabupaten Tanah Datar adalah 32 item. Sedangkan Kota Padang Panjang, jumlah pengungkapan yang seharusnya pada neraca adalah 34 item, rata-rata pengungkapannya adalah 22 item. Dan Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah pengungkapan yang seharusnya pada neraca adalah 40 item, rata-rata pengungkapannya adalah 26 item. Pengungkapan yang tertinggi adalah 33 item pada Kabupaten Tanah Datar dan pengungkapan terendah adalah 17 item pada Kota Padang Panjang .

Pengungkapan laporan realisasi anggaran jumlah pengungkapan yang seharusnya pada Kabupaten Tanah Datar adalah 15 item, rata-rata pengungkapan Kabupaten Tanah Datar adalah 12 item. Sedangkan pada Kota Padang Panjang jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah 15 item, rata-rata pengungkapan Kota Padang Panjang adalah 11 item. Dan pada Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah 15 item, rata-rata pengungkapan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10 item. Pengungkapan yang tertinggi adalah 13 item pada Kabupaten Tanah Datar dan pengungkapan

terendah adalah 10 item pada Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengungkapan laporan arus kas jumlah pengungkapan yang seharusnya 1 item. Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh kota telah mengungkapkannya dari tahun 2012-2014.

Pengungkapan catatan atas laporan keuangan jumlah pengungkapan yang seharusnya pada Kabupaten Tanah Datar adalah 34 item, rata-rata pengungkapan Kabupaten Tanah Datar adalah 20 item. Sedangkan pengungkapan yang seharusnya pada Kota Padang Panjang pada tahun 2012 dan 2014 adalah 33 item, pada tahun 2013 35 item, rata-rata pengungkapan Kota Padang Panjang adalah 15 item. Dan Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah pengungkapan yang seharusnya adalah 33 item, rata-rata pengungkapannya adalah 14 item. Pengungkapan yang tertinggi adalah 20 item pada Kabupaten Tanah Datar dan pengungkapan terendah adalah 12 item pada Kota Padang panjang.

Persentase total tingkat pengungkapan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar dari tahun 2012-2014 masing-masingnya adalah 71,42%, 71,42%, 73,46% . Sementara itu, pada Kota Padang panjang tingkat pengungkapan laporan keuangan pada tahun 2012 adalah 51,13%, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 70%, namun pada tahun 2014 menurun menjadi 63% . Selanjutnya pada Kabupaten Lima

Puluh Kota pengungkapan laporan keuangan pada tahun 2012-2014 adalah 55,31%, 60,63% 63,82%. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian informasi laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang Panjang cukup luas.

Keunggulan dan Kelemahan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dilihat dari tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, terlihat bahwa Kabupaten Tanah Datar tingkat pengungkapannya lebih unggul atau lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Padang Panjang dan Kabupaten Lima Puluh kota. Dimana persentase rata-rata tingkat pengungkapan Kabupaten Tanah Datar yaitu 72,1%, selanjutnya Kota Padang Panjang rata-rata tingkat pengungkapannya yaitu 61,37%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota rata-rata tingkat pengungkapannya adalah 59,92%. Namun dari segi penyajiannya, penggunaan bahasa, jumlah kata, terlihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

B. PEMBAHASAN

Secara umum pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2012-2014 menunjukkan persentase

rata-rata mulai dari 51,13% sampai dengan 73,46% yang berarti tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tergolong cukup luas. Jika dilihat, dari tingkat pengungkapan keluasan informasi Kabupaten Tanah Datar lebih unggul atau lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang Panjang. Namun dilihat dari segi penyajiannya, yaitu penggunaan bahasa, jumlah kata dan rinciang informasi Kabupaten Lima Puluh Kota lebih unggul dibanding Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Sehingga dapat disimpulkan masing-masing daerah dalam penyajian laporan keuangan mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Dari daerah yang diteliti terlihat adanya ketidakseragaman dalam pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rata-rata daerah hanya mengungkapkan informasi umum dan tidak menjelaskan secara rinci, dari item-item yang harus diungkapkan berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), sebagian daerah telah mengungkapkan dan sebagian lagi tidak mengungkapkan, sehingga terdapat ketidakseragaman ditiap-tiap daerah dalam pengungkapan informasi.

Adanya perbedaan atau ketidakseragaman dalam pengungkapan disebabkan belum adanya pengaturan lebih

lanjut mengenai seberapa luas informasi yang harus diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan informasi mana yang dianjurkan, karena bukan hanya kinerja keuangan saja yang dibutuhkan untuk diungkapkan tetapi kinerja non keuangan juga penting untuk diungkapkan karena informasi ini juga sangat menarik bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan persentase dari tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh, dapat dilihat adanya keinginan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan karena adanya keinginan untuk memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan tingkat pengungkapan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, walaupun sudah memperoleh opini terbaik, namun Kabupaten Tanah Datar tetap berkeinginan meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangannya pada tahun 2014. Begitu juga dengan Kota Padang panjang, tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik, dimana pada tahun 2012 54,28% , kemudian naik menjadi 73,68% ditahun 2013 walaupun tahun 2014 kembali menurun. Dan

pada Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat dilihat keinginan untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu pada tahun 2012 dan 2013 63,09% kemudian pada tahun 2014 meningkat 67,95%.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong pengungkapan yang cukup luas karena rata-rata pengungkapan secara keseluruhan pada Kabupaten Tanah Datar 72,1%, Kota Padang Panjang 61,37%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota 59,92% dimana nilai maksimal yang diharapkan dalam pengungkapan informasi adalah 100%, agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui informasi secara meluas.
2. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, setiap daerah mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Keterbatasan penelitian

Dalam Melakukan penelitian ini , peneliti mengalami keterbatasan bahwa penelitian ini hanya mengali sampai pada tahap apakah informasi pengungkapan yang ada di PP No.24 Tahun 2005 sudah diungkapkan atau sudah dipatuhi oleh masing-masing

daerah. Peneliti belum mengali apakah ada keluasan informasi atau informasi tambahan selain yang wajib diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih mengali keluasan informasi pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai indikator, tidak hanya melihat dari sisi kepatuhan pengungkapan terhadap Peraturan Pemerintah
2. Bagi objek penelitian, perlunya pengaturan lebih lanjut dan arahan mengenai seberapa jauh informasi yang harus diungkapkan atau informasi prioritas yang menjadi keharusan dan informasi mana yang dianjurkan, walaupun hal tersebut sudah diatur dalam SAP, agar adanya keseragaman dalam menyajikan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan Ikhsan. 2009. *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abdul Hafiz Tanjung. 2007. *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Ainun Naim dan Fu'ad Rakhman. *Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2000, Vol. 15, No.1 : 70-82

Ahmad Mu'an. 2011. *Basis Akrual dalam Akuntansi*

Pemerintahan Di Indonesia. Tangerang Selatan: Mifaz Rasam Publishing.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan. Jakarta. September 2013.

Bambang Suropto, 1999. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan*, Simposium Nasional Akuntansi II.

Edy Subiyantoro. 1997. *Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia*. Makalah dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi I

Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini. 2013. *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Febriyani Syafitri,. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Hartati, Yenni. 2011. *Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- Hery. 2009. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Gusti Agung, 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian. 2008. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyaul Ulum. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lufri. 2005. *Metodologi Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UII Press.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marjulin. 2012. *Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Banda Aceh dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian* Politeknik Negeri Lhokseumawe Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1.
- Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Media.
- Novi Priyati. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Indeks.
- Nuwun Priyono. *Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai Dengan Pasca-Reformasi*. Vol. 37 No. 1, 15 September 2012 : 81-93.
- Rahman Pura. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Rayanim. 2014. *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi STAIN Batusangkar.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- _____. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rini Adhriani Sarah. 2014. *Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Etikonomi Vol.13 No.1.
- Sri Adella Fitri. 2010. *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Suatu Studi Eksploratif pada

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat).
Skripsi Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas.

Sukrisno Agoes . 2012. *Auditing
Petunjuk Praktis Pemeriksaan
Akuntan oleh Akuntan Publik*.
Jakarta: Salemba Empat.

Suwardjono. 2008. *Teori
Akuntansi Perekayasaan Pelaporan
Keuangan*. Yogyakarta : BPF.

Wardi Arfiah. 2014. *Analisis
Tingkat Disclosure Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah*.
Batusangkar. Skripsi Fakultas
Ekonomi STAIN Batusangkar.

www.bpk.go.id (diakses pada
tanggal 29 januari 2016).

www.djpb.go.id(diakses pada
tanggal 25januari 2016).

<http://hariansinggalang.co.id>
(diakses pada tanggal 29 januari
2016).

www.lenterapena.co.id (diakses
pada tanggal 20 Oktober 2016)